

BERITA RESMI STATISTIK



Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu September 2017

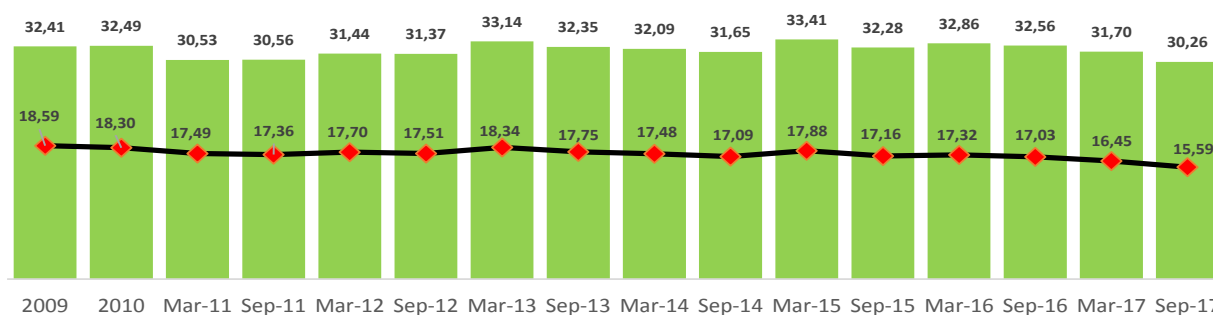
Persentase
Penduduk
Miskin
September
2017 mencapai
15,59 persen

- Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di provinsi Bengkulu mencapai 302.620 orang (15,59 persen), turun sebesar 22.980 orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 325.600 orang (17,03 persen).
- Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 16,16 persen turun menjadi 15,41 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 17,43 persen turun menjadi 15,67 persen pada September 2017.
- Selama periode September 2016 – September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 920 orang (dari 98.070 orang pada September 2016 menjadi 97.150 orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan juga turun sebanyak 22.060 orang (dari 227.530 orang pada Maret 2017 menjadi 205.470 orang pada September 2017).
- Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 76,72 persen.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009-September 2017

Secara umum, pada periode 2009–September 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada tahun 2012 (Maret), dan 2013 (Maret). Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2009 sampai dengan September 2017 ditunjukkan oleh Grafik 1.

Grafik 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu, 2009 - September 2017



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2016-September 2017

Jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu pada September 2017 mencapai 302.620 orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 14.360 orang dibandingkan Maret 2017. Sementara dengan september tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 22.980 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 3.690 sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 10.670 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 16,33 persen menjadi 15,41 persen. Sedangkan di perdesaan turun dari 16,51 persen menjadi 15,67 persen

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu, September 2016- September 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2016	98.070	16,16
Maret 2017	100.840	16,33
September 2017	97.150	15,41
Perdesaan		
September 2016	227.530	17,43
Maret 2017	216.140	16,51
September 2017	205.470	15,67
Perkotaan + Perdesaan		
September 2016	325.600	17,03
Maret 2017	316.980	16,45
September 2017	302.620	15,59

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016, Maret 2017, dan September 2017

3. Perubahan Garis Kemiskinan September 2016-September 2017

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2016 sampai dengan September 2017. Selama periode Maret 2017–September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,69 yaitu dari Rp450.648,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp462.768,- per kapita per bulan pada September 2017. Sementara pada periode September 2016–September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,85 persen, yaitu dari Rp437.184,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp462.768,- per kapita per bulan pada September 2017.

Tabel 2.
Garis Kemiskinan Menurut Daerah, September 2016 – September 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Sep-16	335.957	122.478	458.435
Mar-17	350.441	127.360	477.801
Sep-17	361.375	129.101	490.475
Perubahan Sep'16 – Sep' 17 (%)	7,57	5,41	6,99
Perubahan Mar'-16 – Sep' 17 (%)	3,12	1,37	2,65
<u>Perdesaan</u>			
Sep-16	335.624	91.690	427.315
Mar-17	341.275	97.067	438.342
Sep-17	352.385	97.472	449.857
Perubahan Sep'16 – Sep' 17 (%)	4,99	6,31	5,28
Perubahan Mar'-16 – Sep' 17 (%)	3,26	0,42	2,63
<u>Perkotaan + Perdesaan</u>			
Sep-16	335.717	101.468	437.184
Mar-17	343.869	106.779	450.648
Sep-17	355.033	107.735	462.768
Perubahan Sep'16 – Sep' 17 (%)	5,75	6,18	5,85
Perubahan Mar'-16 – Sep' 17 (%)	3,25	0,89	2,69

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2017 sebesar 76,72 persen. Pada September 2017, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras yang memberi sumbangan sebesar 16,46 persen di perkotaan dan 25,47 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK (13,57 persen di perkotaan dan 12,25 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging sapi (10,05 persen di perkotaan dan 4,46 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,18 persen di perkotaan dan 3,08 di perdesaan), daging ayam ras (4,17 persen di perkotaan dan 3,10 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, pakaian jadi anak-anak, perlengkapan mandi, dan pajak kendaraan bermotor. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2017

Jenis Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan	73,68	Makanan	78,33
Beras	16,46	Beras	25,47
Rokok kretek filter	13,57	Rokok kretek filter	12,25
Daging sapi	10,05	Daging sapi	4,46
Telur ayam ras	4,18	Telur ayam ras	3,08
Daging ayam ras	4,17	Daging ayam ras	3,10
Cabe merah	2,91	Cabe merah	3,40
Gula pasir	2,03	Gula pasir	2,55
Bawang merah	1,64	Bawang merah	1,98
Mie instan	1,38	Mie instan	1,53
Tempe	1,32	Tempe	1,44
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,21	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,25
Tongkol/tuna/cakalang	1,16	Tongkol/tuna/cakalang	1,36
Lainnya	13,60	Lainnya	15,46
Bukan makanan	26,32	Bukan makanan	21,67
Perumahan	6,86	Perumahan	6,74
Listrik	3,50	Listrik	2,20
Bensin	5,79	Bensin	3,68
Pendidikan	2,27	Pendidikan	1,23
Pakaian jadi anak-anak	1,35	Pakaian jadi anak-anak	0,68
Perlengkapan mandi	0,96	Perlengkapan mandi	0,94
Pajak kendaraan bermotor	0,71	Pajak kendaraan bermotor	0,47
Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,55	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,58
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,51	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,57
Angkutan	0,48	Angkutan	0,37
Lainnya	3,35	Lainnya	4,22

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 2,86 dan pada September 2017 sebesar 2,76. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,75 menjadi 0,71 pada periode yang sama (Tabel 4). Sementara apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2016–September 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) cenderung mengalami penurunan yaitu dari 2,79 menjadi 2,76 sedangkan indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan dari 0,64 menjadi 0,71.

Tabel 4.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Daerah, September 2016 - September 2017

Daerah/Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+perdesaan
(1)	(2)	(3)	(3)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2016	2,89	2,74	2,79
Maret 2017	2,97	2,80	2,86
September 2017	3,24	2,53	2,76
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2016	0,65	0,64	0,64
Maret 2017	0,76	0,75	0,75
September 2017	0,99	0,58	0,71

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016, Maret 2017, dan September 2017

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Pada September 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 3,235 sementara di daerah perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 2,532. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,987 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,582.

5. Gini Ratio September 2017

1. Gini Ratio menggambarkan ketimpangan pendapatan/pengeluaran di suatu wilayah, Indeks ini berada pada nilai 0 - 1, dimana bila mendekati 0 berarti tidak ada sama sekali ketimpangan, dan ketimpangan sempurna bila nilai indeks sebesar 1.
2. Gini Ratio pada bulan September 2017 mengalami penurunan menjadi 0,349 atau turun 0,002 yang memiliki makna ketimpangan sedikit berkurang pada bulan September 2017.

Tabel 5.
Gini Rasio Menurut
Provinsi di Sumatera, Maret 2017 - September 2017

PROVINSI	Maret 2017			September 2017		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
11 Aceh	0,347	0,293	0,329	0,334	0,299	0,329
12 Sumatera Utara	0,342	0,256	0,315	0,365	0,264	0,335
13 Sumatera Barat	0,336	0,276	0,318	0,309	0,288	0,312
14 Riau	0,353	0,289	0,325	0,343	0,299	0,325
15 Jambi	0,384	0,284	0,335	0,379	0,295	0,334
16 Sumatera Selatan	0,384	0,317	0,361	0,387	0,328	0,365
17 Bengkulu	0,390	0,305	0,351	0,379	0,317	0,349
18 Lampung	0,364	0,297	0,334	0,360	0,301	0,333
19 Bangka Belitung	0,303	0,219	0,282	0,288	0,236	0,276
21 Kepulauan Riau	0,327	0,279	0,334	0,355	0,286	0,359
INDONESIA	0,407	0,320	0,393	0,404	0,320	0,391

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, dan September 2017

6. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2017 adalah data Susenas bulan September 2017. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Maret 2017 - September 2017

PROVINSI	Maret 2017			September 2017		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
11 Aceh	172,35	700,26	872,61	166,77	663,03	829,80
12 Sumatera Utara	710,71	743,17	1.453,87	663,27	663,30	1.326,57
13 Sumatera Barat	113,01	251,50	364,51	114,59	245,41	359,99
14 Riau	178,58	336,03	514,62	176,98	319,41	496,39
15 Jambi	120,62	165,93	286,55	118,49	160,11	278,61
16 Sumatera Selatan	375,25	711,67	1.086,92	379,72	707,04	1.086,76
17 Bengkulu	100,84	216,14	316,98	97,15	205,47	302,62
18 Lampung	228,32	903,41	1.131,73	211,97	871,77	1.083,74
19 Bangka Belitung	21,47	52,61	74,09	23,04	53,16	76,20
21 Kepulauan Riau	91,49	33,88	125,37	96,77	31,66	128,43
31 DKI Jakarta	389,69		389,69	393,13		393,13
32 Jawa Barat	2.588,62	1.579,82	4.168,44	2.391,23	1.383,18	3.774,41
33 Jawa Tengah	1.889,09	2.561,63	4.450,72	1.815,58	2.381,92	4.197,49
34 DI Yogyakarta	309,03	179,51	488,53	298,39	167,94	466,33
35 Jawa Timur	1.574,12	3.042,89	4.617,01	1.455,45	2.949,82	4.405,27
36 Banten	391,03	284,00	675,04	415,67	284,16	699,83
51 Bali	96,89	83,23	180,13	96,07	80,40	176,48
52 Nusa Tenggara Barat	387,04	406,73	793,78	368,55	379,57	748,12
53 Nusa Tenggara Timur	117,40	1.033,39	1.150,79	119,04	1.015,70	1.134,74
61 Kalimantan Barat	76,16	311,27	387,43	83,89	304,92	388,81
62 Kalimantan Tengah	42,84	96,32	139,16	48,34	89,55	137,88
63 Kalimantan Selatan	62,60	131,32	193,92	66,21	128,35	194,56
64 Kalimantan Timur	94,05	126,12	220,17	102,39	116,28	218,67
65 Kalimantan Utara	18,02	31,45	49,47	21,81	26,75	48,56
71 Sulawesi Utara	59,82	139,05	198,88	59,95	134,90	194,85
72 Sulawesi Tengah	77,98	339,88	417,87	81,56	341,72	423,27
73 Sulawesi Selatan	153,56	659,51	813,07	166,50	659,47	825,97
74 Sulawesi Tenggara	62,75	268,96	331,71	67,96	245,19	313,16
75 Gorontalo	23,87	181,50	205,37	21,23	179,68	200,91
76 Sulawesi Barat	23,50	126,26	149,76	30,02	119,45	149,47
81 Maluku	51,24	269,27	320,51	47,83	272,59	320,42
82 Maluku Utara	12,00	64,47	76,47	12,93	65,35	78,28
91 Papua Barat	20,70	207,69	228,38	19,02	193,83	212,86
94 Papua	39,17	858,51	897,69	41,06	869,36	910,42
INDONESIA	10.673,83	17.097,39	27.771,22	10.272,55	16.310,44	26.582,99

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, dan September 2017

Tabel 7.
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2017 - September 2017

PROVINSI	GKM		GKNM		GK	
	Maret 2017	September 2017	Maret 2017	September 2017	Maret 2017	September 2017
11 Aceh	330.958	346.552	104.496	107.572	435.454	454.124
12 Sumatera Utara	314.243	321.967	97.102	101.729	411.345	423.696
13 Sumatera Barat	346.896	348.429	106.715	107.368	453.612	455.797
14 Riau	335.922	342.348	120.571	122.833	456.493	465.181
15 Jambi	301.576	306.360	88.019	90.001	389.596	396.361
16 Sumatera Selatan	279.284	284.680	90.775	93.568	370.060	378.248
17 Bengkulu	343.869	355.033	106.779	107.735	450.648	462.768
18 Lampung	289.706	291.600	95.176	98.583	384.882	390.183
19 Bangka Belitung	424.845	441.580	162.685	166.347	587.530	607.927
21 Kepulauan Riau	346.267	362.339	166.969	173.687	513.237	536.027
31 DKI Jakarta	347.383	383.192	189.163	195.054	536.546	578.247
32 Jawa Barat	248.505	254.799	95.922	99.879	344.427	354.679
33 Jawa Tengah	244.606	248.612	88.618	90.203	333.224	338.815
34 DI Yogyakarta	267.501	282.639	106.508	113.632	374.009	396.271
35 Jawa Timur	250.805	266.469	91.287	93.833	342.092	360.302
36 Banten	272.552	288.655	114.201	118.333	386.753	406.988
51 Bali	249.884	251.921	111.504	112.143	361.387	364.064
52 Nusa Tenggara Barat	257.263	263.301	88.078	89.389	345.341	352.690
53 Nusa Tenggara Timur	272.537	273.325	70.859	73.412	343.396	346.737
61 Kalimantan Barat	297.455	312.222	79.764	84.620	377.219	396.842
62 Kalimantan Tengah	320.637	325.133	80.900	81.703	401.537	406.836
63 Kalimantan Selatan	287.960	297.743	114.464	122.231	402.424	419.974
64 Kalimantan Timur	389.152	398.030	158.943	163.838	548.094	561.868
65 Kalimantan Utara	398.123	418.003	153.917	160.302	552.040	578.305
71 Sulawesi Utara	257.489	259.010	76.021	77.393	333.510	336.403
72 Sulawesi Tengah	297.376	311.145	94.388	97.377	391.763	408.522
73 Sulawesi Selatan	211.452	219.551	72.009	74.807	283.461	294.358
74 Sulawesi Tenggara	215.620	224.360	69.990	75.898	285.609	300.258
75 Gorontalo	229.466	239.329	67.265	68.377	296.730	307.707
76 Sulawesi Barat	239.359	249.544	63.493	66.374	302.852	315.918
81 Maluku	333.357	345.090	103.508	106.124	436.865	451.214
82 Maluku Utara	306.642	310.354	84.356	86.985	390.998	397.340
91 Papua Barat	389.400	395.479	110.377	114.383	499.778	509.861
94 Papua	344.637	346.106	112.904	117.951	457.541	464.056
INDONESIA	274.544	283.964	99.933	103.196	374.478	387.160

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2017

Diterbitkan oleh:



BPS Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik KM.8
Bengkulu, 38225



Duaksa Aritonang, SE, M.M.
Kepala Bidang Statistik Sosial
Telepon: 349117-118
E-mail: duaksart@bps.go.id
Website : www.bengkulu.bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.